



SUMBER BERITA

SENIN, 16 APRIL 2018

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bupati Didesak Copot Kadis PUPR

ARGA MAKMUR, BE – Ketua DPC Ormas Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Herman Aryudi menegaskan dalam pekerjaan 4 proyek itu, Kadis PUPR harus bertanggung jawab.

Karena selaku pimpinan DPUPR, harusnya sudah mengetahui sejak awal jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan kontraktor, berdasarkan laporan pekerjaan secara berkala.

"Kalau seperti itu, berarti pengawasan lapangan dari DPUPR tidak pernah turun ke lapangan melakukan pengecekan pekerjaan secara langsung dan hanya menerima laporan diatas kertas saja. Artinya, Kadis selaku pimpinan harus bertanggungjawab," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan berdasarkan laporan tidak ada gangguan dari masyarakat dalam 3 pekerjaan itu. Mulai dari proyek hotmix Air Pandan, Kota Bani dan Irigasi Sengkuang. Bahkan juga ada tim pengawasan independen yang digunakan dari akademisi. Namun, jika memang proyek itu tidak dapat diselesaikan, harusnya Kadis PUPR bisa menghentikan pekerjaan dan tidak memberikan perpanjangan kontrak hingga 50 hari di tahun 2018.

"Kalau proyek Gapura memang sejak awal sering terjadi gejalak, maka ada alasan hingga tidak selesai. Tapi, untuk 3 proyek yang pagu anggarannya lebih dari Rp 20 Miliar, tidak konflik apapun dari masyarakat," terangnya.

Untuk itu, ia mengharapkan Bupati BU, Ir Mian dapat tegas mencopot jabatan Kadis PUPR yang telah dianggap lalai dan tidak berhasil. Disamping itu, ia juga sangat mendukung DPRD BU agar dapat segera membentuk pansus untuk mengusut tuntas 4 proyek yang tidak selesai di tahun 2017 itu. "Harusnya bupati tegas. Karena sudah jelas kesalahan Kadis dan pejabat lainnya di DPUPR. Maka harusnya diganti dengan yang lebih mampu. DPRD juga kita minta agar benar-benar dapat membentuk Pansus menyelidiki 4 proyek itu," jelasnya.

Tak hanya itu, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

BU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) BU juga telah turun melakukan pengecekan 4 paket proyek yang tidak selesai. Pihak Kejari tengah mengumpulkan data dan mendalami proyek tersebut. Terkait hal itu, Kajari BU, Fatkhuri SH melalui Kasi Intel Polmen Butar Butar SH dikonfirmasi belum ingin berkomentar lebih lanjut terkait hal itu. "Saya lagi Diklat di Jakarta. Minggu depan saya baru masuk. Dari pada salah pengertian yang mana maksudnya. Kalau dapat konfirmasi ke saya langsung di kantor saja," terangnya.

Sementara itu, Kapolres BU, AKBP Ariefaldi Warganegara SH SIK MM melalui Kasat Reskrim, AKP Jufri SIK dihubungi BE menyebutkan tidak menangani kasus itu. Hal ini, lantaran sudah dilakukan penyelidikan oleh Kejari BU. "Kalau sudah ditangani pihak lain (Kejari,red), tidak mungkin kita akan menanganinya juga," tuturnya.

Kadis PUPR BU, Heru Susanto ST yang berusaha dihubungi BE dan melalui pesan singkat (WhatsApp, red) juga belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Ia hanya menyampaikan jika dirinya sedang Dinas Luar (DL,red) dan tidak dapat diganggu. "lagi DL dek," pungkasnya melalui isi balasan pesan WhatsApp.

Disisi lain, DPRD Bengkulu Utara (BU), memastikan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) minggu depan. Tujuan

Pansus untuk melakukan evaluasi kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bengkulu Utara (BU) serta melakukan penyelidikan secara mendalam kendala 4 proyek tahun 2017 menimbulkan masalah.

"Sesudah Paripurna DPRD mengenai pandangan fraksi terkait LPKP Bupati 2017 hari Rabu (18/4), kemudian dewan akan rapat internal membentuk pansus," tegas Anggota DPRD BU, Dedi Syafroni SIP dari Fraksi Merah Putih.

Anggota Komisi III Bidang Pengawasan ini menambahkan DPRD akan menyelidiki satu persatu 4 paket yang tidak selesai dikerjakan. Mulai dari, peningkatan jalan hotmix Air Sabai-Air Pandan kecamatan Putri Hijau senilai Rp 6,3 Miliar. Selanjutnya, proyek irigasi di Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) senilai Rp 4,9 Miliar.

Kemudian, peningkatan jalan hotmix Kota Bani-Suka Baru senilai Rp 11 Miliar. Terakhir, pembuatan Gapura tapal batas (Tabat) di Bukit Resam Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya senilai Rp 746 juta. "Pembentukan Pansus ini, kita sampaikan saat pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu. Kita inginkan Pansus dibentuk agar dapat mengetahui kendala sebenarnya 4 proyek tahun 2017, tidak dapat diselesaikan," ungkapnya.

Terpisah Ketua DPRD BU,

Aliantor Harahap SE menyampaikan pembentukan Pansus merupakan hal biasa untuk mencari informasi lebih mendalam terkait suatu kinerja yang dilaksanakan pemerintah. Untuk itu, Pansus harus dapat mengambil kesimpulan sebagai rekomendasi kepada bupati serta dapat ditindaklanjuti ranah penegakan hukum. "Kita sudah 2 kali melakukan rapat internal di DPRD untuk rencana tindak lanjut pembentukan Pansus ini. Dalam minggu depan kita akan bahas kembali soal rencana pembentukan Pansus," terangnya.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir Mian menyampaikan akan tetap melanjutkan 4 proyek itu. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan lelang kembali. Sedangkan anggarannya, menggunakan sisa anggaran sebelumnya yang masih berada di Kas Daerah (Kasda).

"Rencananya kita akan lanjutkan pembangunan tahun ini. Insyaallah tidak ada kendala," tuturnya.

Bupati menjelaskan sangat mengerti keinginan masyarakat agar pekerjaan itu dapat selesai dan dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Untuk itu, persiapan guna kelanjutan proyek itu, tengah dilakukan.

"Memang masyarakat sangat menginginkan agar pekerjaan itu dapat dilanjutkan. Maka, kita sedang mempersiapkannya," jelasnya. (816)